

ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang pengelolaannya terdapat tumpang tindih aturan maupun hukum, yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan pengelolaan dan berpotensi terjadi penyimpangan. Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk menganalisis pengaturan pengelolaan sumber daya alam batubara dalam perspektif perundang-undangan Indonesia. (2) Untuk menganalisis penerapan konsep harmonisasi hukum pengelolaan sumber daya alam batubara yang berbasis pembangunan berkelanjutan dalam perspektif hukum pidana. (3) Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana konstruksi hukum yang ideal tentang pengelolaan sumber daya alam batubara dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berkepastian hukum dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang, pendekatan politik hukum dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Ketentuan pengaturan pengelolaan sumber daya alam batubara secara filosofis diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan secara yuridis dinormakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam batubara. Pengelolaan pertambangan batubara harus terjamin hak warga negara terhadap hak lingkungan yang baik dan sehat. Upaya pemerintah dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam pengelolaan pertambangan adalah pembangunan yang berkelanjutan dalam pertambangan yang diintegrasikan dalam rangka pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dari hubungan antara satu kegiatan dan kegiatan lain dalam pertambangan batubara, mengharuskan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara aturan yang satu dengan lainnya termasuk aturan mengenai pemidanaan sebagai sanksi yang bersifat ultimum remedium. Hukum yang terkait dengan proses perizinan yang berindikasi pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, maka persoalannya adalah fokus pada perbuatan pidana yang dilakukan secara langsung oleh seseorang, dan badan hukum yang mengambil batubara tanpa disertai dengan proses izin, kemudian menjual dan mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu. Konstruksi hukum yang ideal tentang pengelolaan sumber daya alam batubara dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berkepastian hukum dalam perspektif hukum pidana, sebenarnya secara filosofis terkandung dalam konstitusi.

Kata Kunci: *Pertambangan, Sumber Daya Alam, Pembangunan Berkelanjutan*

**LEGAL HARMONIZATION OF COAL NATURAL RESOURCES
MANAGEMENT BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN CRIMINAL LAW PERSPECTIVE**

ABSTRACT

Indonesia has natural resources whose management has overlapping rules and laws, which results in delays in management activities and the potential for irregularities. This research aims; (1) To analyze the management of coal natural resources from the perspective of Indonesian legislation. (2) To analyze the application of the concept of harmonization of coal natural resource management laws based on sustainable development from a criminal law perspective. (3) To analyze and discover the ideal legal construction regarding the management of coal natural resources in order to realize sustainable development that is just and has legal certainty from a criminal law perspective. This research uses a normative juridical type with steps of description, systematization and explanation of the content of positive law in depth using a conceptual approach, statutory approach, legal political approach and historical approach. The research results show that; Provisions for regulating the management of coal natural resources are philosophically regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and are juridically normed in various laws and regulations relating to the management of coal natural resources. Coal mining management must guarantee citizens' rights to a good and healthy environment. The government's efforts to fulfill the right to a good and healthy environment in mining management are sustainable development in mining which is integrated into the framework of long-term, medium-term and short-term development. From the relationship between one activity and another activity in coal mining, it requires harmonization and synchronization between one rule and another, including the rules regarding punishment as an ultimum remedium sanction. Laws related to the licensing process that indicate abuse of authority by state officials, the problem is focused on criminal acts committed directly by individuals, and legal entities that take coal without being accompanied by a permit process, then sell and make a profit from that act. The ideal legal construction regarding the management of coal natural resources in the context of realizing sustainable development that is just and with legal certainty from a criminal law perspective, is actually philosophically contained in the constitution.

Keywords: Mining, Natural Resources, Sustainable Development.